



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.
(021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

LAPORAN MONITORING, VERIFIKASI, DAN UPDATE STATUS TELAAH PENGADUAN BULAN JANUARI TAHUN 2025

NOMOR : R-3/08300/PW.120/LHP/2025

TANGGAL : 17 March 2025

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan perencanaan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan suatu pengawasan. Inspektorat Utama BPS sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPS dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS.

Tim 16 adalah tim yang bertugas mengelola pengaduan dan investigasi BPS. Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang digunakan dalam pengendalian korupsi melalui pengungkapan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Monitoring, verifikasi, dan updating status telaah pengaduan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem pengaduan internal BPS. Dalam menghadapi berbagai laporan yang masuk, auditor internal bertugas untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem dalam menangani laporan.

B. Landasan Penugasan

1. Nomor dan Tanggal : SK Inspektur Utama BPS Nomor 1 Tahun 2025
Surat Keputusan tanggal 7 Januari 20205
2. Tim
 - Pengendali Teknis : S. Maruli T. Pane, MM
NIP. 197410051994031005
 - Ketua Tim : Kelik Yunandar, SE, MM
NIP. 198406162006041002
 - Anggota Tim : Alifia Nidya Hapsari, SST
NIP. 199311062016022001
 - Albert Krisman Harefa, SST
NIP. 199412092017011001

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
9. Keputusan Kepala BPS No. 477 Tahun 2020 terkait Tindak Lanjut Pengaduan.
10. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025.
11. Surat Tugas Inspektur Wilayah III Nomor B-24/08300/PW.100/2025 Tanggal 11 Februari 2025 tentang Monitoring, Verifikasi, dan Update Status Telaah Laporan Pengaduan Bulan Februari Tahun 2025.

D. Tujuan

1. Memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan guna menghindari laporan palsu atau tidak valid.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memastikan pembaruan status telaah kasus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring ini meliputi:

1. Tim pengelola pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan.
2. Sistem pengaduan yang digunakan untuk memastikan fungsionalitas dan efektivitasnya.

F. Metodologi

1. Verifikasi Laporan Masuk: Menilai keabsahan laporan yang diterima untuk memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti adalah valid dan bukan laporan palsu.
2. Analisis Bukti: Mengumpulkan dan menelaah bukti yang tersedia untuk menilai apakah informasi yang diberikan cukup untuk mendukung investigasi lebih lanjut.
3. Telaah Kasus: Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan yang telah diverifikasi, termasuk analisis konteks, pihak terkait, dan dampak yang ditimbulkan.
4. Evaluasi dan Rekomendasi: Menyusun laporan evaluasi berdasarkan temuan monitoring serta menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah laporan pengaduan yang masuk dari berbagai media.

H. Hasil

Berikut hasil monitoring, verifikasi, dan update status telaah Bulan Februari Tahun 2025:

Kategori	Jumlah
Total Laporan Masuk	2
- Laporan Pengaduan	1
- Laporan Bukan Pengaduan	1
Pengaduan yang Diverifikasi	2
- Pengaduan Ditolak (Pengaduan Ganda)	0
- Pengaduan Ditolak (Keterangan Tidak Lengkap)	2
- Pengaduan Ditelaah	0
Telaah Pengaduan	0
- Selesai Telaah	-
- Proses Telaah	0

Detail pengaduan dapat dilihat pada Lampiran.

Demikian Laporan Hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur Wilayah III



Efliza

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Utama.

Lampiran 1
 Nomor : R-3/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 17 March 2025

LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN

No.	Sumber Laporan		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Tipe Media	Sumber	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	Langsung	Lapor Langsung	-	-	-	-	-	-	-
2	Langsung	Lapor Online	-	-	-	-	-	-	-
3	Website	WBS BPS	2	1	1	-	-	1	-
4	Website	SP4N LAPOR	-	-	-	-	-	-	-
5	Email	Email BPS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
6	Surat	Disposisi Fisik	-	-	-	-	-	-	-
7	Surat	Disposisi Srikandi	-	-	-	-	-	-	-
8	Chat	Whatsapp Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
9	Chat	SMS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
Total			2	1	1	-	-	1	-

Lampiran 2
 Nomor : R-3/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 17 March 2025

LAPORAN BERDASARKAN LOKUS PENGADUAN

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	0000	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	-	-	-
2	0100	Kepala BPS	-	-	-	-	-	-	-
3	0200	Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	-	-
4	0300	Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik	1	-	1	-	-	-	-
5	0400	Deputi Bidang Statistik Sosial	-	-	-	-	-	-	-
6	0500	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	-	-	-	-
7	0600	Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
8	0700	Deputi Bidang Neraca Dan Analisis Statistik	-	-	-	-	-	-	-
9	0800	Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-
10	1100	BPS Provinsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-
11	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
12	1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	1400	BPS Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-
14	1500	BPS Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-
15	1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
16	1700	BPS Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
17	1800	BPS Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-
18	1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
19	2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
20	3100	BPS Provinsi D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
21	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
22	3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
23	3400	BPS D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
24	3500	BPS Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
25	3600	BPS Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-
26	5100	BPS Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
27	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	1	-	-	-	1	-
28	5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
29	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
30	6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
31	6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
32	6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
33	6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
34	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
35	7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
36	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
37	7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
38	7500	BPS Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
39	7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
40	8100	BPS Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-
41	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
42	9100	BPS Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
43	9400	BPS Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-
44	9999	BPS Provinsi Ceria	-	-	-	-	-	-	-
45	0260	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS	-	-	-	-	-	-	-
46	0270	Politeknik Statistika STIS	-	-	-	-	-	-	-
Total			2	1	1	-	-	1	-



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.
(021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

LAPORAN MONITORING, VERIFIKASI, DAN UPDATE STATUS TELAAH PENGADUAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NOMOR : R-2/08300/PW.120/LHP/2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan perencanaan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan suatu pengawasan. Inspektorat Utama BPS sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPS dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS.

Tim 16 adalah tim yang bertugas mengelola pengaduan dan investigasi BPS. Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang digunakan dalam pengendalian korupsi melalui pengungkapan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Monitoring, verifikasi, dan updating status telaah pengaduan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem pengaduan internal BPS. Dalam menghadapi berbagai laporan yang masuk, auditor internal bertugas untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem dalam menangani laporan.

B. Landasan Penugasan

1. Nomor dan Tanggal : B-24/08300/PW.100/2025
Surat Tugas Tanggal 11 Februari 2025
2. Tanggal Penugasan : 11 Februari s.d. 28 Februari 2025
3. Tim
 - Pengendali Teknis : S. Maruli T. Pane, MM
NIP. 197410051994031005
 - Ketua Tim : Kelik Yunandar, SE, MM
NIP. 198406162006041002
 - Anggota Tim : Alifia Nidya Hapsari, SST
NIP. 199311062016022001
 - Albert Krisman Harefa, SST
NIP. 199412092017011001

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
9. Keputusan Kepala BPS No. 477 Tahun 2020 terkait Tindak Lanjut Pengaduan.
10. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025.
11. Surat Tugas Inspektur Wilayah III Nomor B-24/08300/PW.100/2025 Tanggal 11 Februari 2025 tentang Monitoring, Verifikasi, dan Update Status Telaah Laporan Pengaduan Bulan Februari Tahun 2025.

D. Tujuan

1. Memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan guna menghindari laporan palsu atau tidak valid.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memastikan pembaruan status telaah kasus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring ini meliputi:

1. Tim pengelola pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan.
2. Sistem pengaduan yang digunakan untuk memastikan fungsionalitas dan efektivitasnya.

F. Metodologi

1. Verifikasi Laporan Masuk: Menilai keabsahan laporan yang diterima untuk memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti adalah valid dan bukan laporan palsu.
2. Analisis Bukti: Mengumpulkan dan menelaah bukti yang tersedia untuk menilai apakah informasi yang diberikan cukup untuk mendukung investigasi lebih lanjut.
3. Telaah Kasus: Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan yang telah diverifikasi, termasuk analisis konteks, pihak terkait, dan dampak yang ditimbulkan.

4. Evaluasi dan Rekomendasi: Menyusun laporan evaluasi berdasarkan temuan monitoring serta menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah laporan pengaduan yang masuk dari berbagai media.

H. Hasil

Berikut hasil monitoring, verifikasi, dan update status telaah Bulan Februari Tahun 2025:

Kategori	Jumlah
Total Laporan Masuk	37
- Laporan Pengaduan	37
- Laporan Bukan Pengaduan	-
Pengaduan yang Diverifikasi	37
- Pengaduan Ditolak (Pengaduan Ganda)	35
- Pengaduan Ditolak (Keterangan Tidak Lengkap)	1
- Pengaduan Ditelaah	1
Telaah Pengaduan	1
- Selesai Telaah	-
- Proses Telaah	1

Detail pengaduan dapat dilihat pada Lampiran.

Demikian Laporan Hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur Wilayah III



Eliza

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Utama.

Lampiran 1
 Nomor : R-2/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 17 Maret 2025

LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN

No.	Sumber Laporan		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Tipe Media	Sumber	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	Langsung	Lapor Langsung	-	-	-	-	-	-	-
2	Langsung	Lapor Online	-	-	-	-	-	-	-
3	Website	WBS BPS	37	37	-	-	1	36	-
4	Website	SP4N LAPOR	-	-	-	-	-	-	-
5	Email	Email BPS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
6	Surat	Disposisi Fisik	-	-	-	-	-	-	-
7	Surat	Disposisi Srikandi	-	-	-	-	-	-	-
8	Chat	Whatsapp Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
9	Chat	SMS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
Total			37	37	-	-	1	36	-

Lampiran 2
 Nomor : R-2/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 17 Maret 2025

LAPORAN BERDASARKAN LOKUS PENGADUAN

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	0000	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	-	-	-
2	0100	Kepala BPS	-	-	-	-	-	-	-
3	0200	Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	-	-
4	0300	Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik	-	-	-	-	-	-	-
5	0400	Deputi Bidang Statistik Sosial	-	-	-	-	-	-	-
6	0500	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	-	-	-	-
7	0600	Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
8	0700	Deputi Bidang Neraca Dan Analisis Statistik	-	-	-	-	-	-	-
9	0800	Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-
10	1100	BPS Provinsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-
11	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
12	1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	1	1	-	-	-	1	-
13	1400	BPS Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-
14	1500	BPS Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-
15	1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
16	1700	BPS Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
17	1800	BPS Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-
18	1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
19	2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
20	3100	BPS Provinsi D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
21	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
22	3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
23	3400	BPS D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
24	3500	BPS Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
25	3600	BPS Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-
26	5100	BPS Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
27	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
28	5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
29	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
30	6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
31	6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
32	6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
33	6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
34	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
35	7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	36	36	-	-	1	35	-
36	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
37	7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
38	7500	BPS Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
39	7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
40	8100	BPS Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-
41	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
42	9100	BPS Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
43	9400	BPS Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-
44	9999	BPS Provinsi Ceria	-	-	-	-	-	-	-
45	0260	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS	-	-	-	-	-	-	-
46	0270	Politeknik Statistika STIS	-	-	-	-	-	-	-
Total			37	37	-	-	1	36	-



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.
(021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

LAPORAN MONITORING, VERIFIKASI, DAN UPDATE STATUS TELAAH PENGADUAN BULAN MARET TAHUN 2025

NOMOR : R-4/08300/PW.120/LHP/2025

TANGGAL : 14 April 2025

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan perencanaan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan suatu pengawasan. Inspektorat Utama BPS sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPS dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS.

Tim 16 adalah tim yang bertugas mengelola pengaduan dan investigasi BPS. Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang digunakan dalam pengendalian korupsi melalui pengungkapan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Monitoring, verifikasi, dan updating status telaah pengaduan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem pengaduan internal BPS. Dalam menghadapi berbagai laporan yang masuk, auditor internal bertugas untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem dalam menangani laporan.

B. Landasan Penugasan

1. Nomor dan Tanggal Surat Tugas : B-43/08300/PW.100/2025
Tanggal 1 Maret 2025
2. Tanggal Penugasan : 1 s.d. 31 Maret 2025
3. Tim
Pengendali Teknis : S. Maruli T. Pane, MM
NIP. 197410051994031005
Ketua Tim : Kelik Yunandar, SE, MM
NIP. 198406162006041002
Anggota Tim : Alifia Nidya Hapsari, SST
NIP. 199311062016022001
Albert Krisman Harefa, SST
NIP. 199412092017011001

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
9. Keputusan Kepala BPS No. 477 Tahun 2020 terkait Tindak Lanjut Pengaduan.
10. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025.
11. Surat Tugas Inspektur Wilayah III Nomor B-24/08300/PW.100/2025 Tanggal 11 Februari 2025 tentang Monitoring, Verifikasi, dan Update Status Telaah Laporan Pengaduan Bulan Februari Tahun 2025.

D. Tujuan

1. Memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan guna menghindari laporan palsu atau tidak valid.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memastikan pembaruan status telaah kasus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring ini meliputi:

1. Tim pengelola pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan.
2. Sistem pengaduan yang digunakan untuk memastikan fungsionalitas dan efektivitasnya.

F. Metodologi

1. Verifikasi Laporan Masuk: Menilai keabsahan laporan yang diterima untuk memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti adalah valid dan bukan laporan palsu.
2. Analisis Bukti: Mengumpulkan dan menelaah bukti yang tersedia untuk menilai apakah informasi yang diberikan cukup untuk mendukung investigasi lebih lanjut.
3. Telaah Kasus: Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan yang telah diverifikasi, termasuk analisis konteks, pihak terkait, dan dampak yang ditimbulkan.

4. Evaluasi dan Rekomendasi: Menyusun laporan evaluasi berdasarkan temuan monitoring serta menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah laporan pengaduan yang masuk dari berbagai media.

H. Hasil

Berikut hasil monitoring, verifikasi, dan update status telaah Bulan Februari Tahun 2025:

Kategori	Jumlah
Total Laporan Masuk	4
- Laporan Pengaduan	4
- Laporan Bukan Pengaduan	-
Pengaduan yang Diverifikasi	4
- Pengaduan Ditolak (Pengaduan Ganda)	-
- Pengaduan Ditolak (Keterangan Tidak Lengkap)	1
- Pengaduan Ditelaah	3
Telaah Pengaduan	3
- Selesai Telaah	-
- Proses Telaah	3

Detail pengaduan dapat dilihat pada Lampiran.

Demikian Laporan Hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur Wilayah III



Efiza

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Utama.

Lampiran 1
 Nomor : R-4/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 14 April 2025

LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN

No.	Sumber Laporan		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Tipe Media	Sumber	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	Langsung	Lapor Langsung	-	-	-	-	-	-	-
2	Langsung	Lapor Online	-	-	-	-	-	-	-
3	Website	WBS BPS	4	4	-	-	3	1	-
4	Website	SP4N LAPOR	-	-	-	-	-	-	-
5	Email	Email BPS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
6	Surat	Disposisi Fisik	-	-	-	-	-	-	-
7	Surat	Disposisi Srikandi	-	-	-	-	-	-	-
8	Chat	Whatsapp Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
9	Chat	SMS Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-
Total			4	4	-	-	3	1	-

Lampiran 2
 Nomor : R-4/08300/PW.120/LHP/2025
 Tanggal : 14 April 2025

LAPORAN BERDASARKAN LOKUS PENGADUAN

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
1	0000	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	-	-	-
2	0100	Kepala BPS	-	-	-	-	-	-	-
3	0200	Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	-	-
4	0300	Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik	-	-	-	-	-	-	-
5	0400	Deputi Bidang Statistik Sosial	-	-	-	-	-	-	-
6	0500	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	-	-	-	-
7	0600	Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
8	0700	Deputi Bidang Neraca Dan Analisis Statistik	-	-	-	-	-	-	-
9	0800	Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-
10	1100	BPS Provinsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-
11	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
12	1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	1400	BPS Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-
14	1500	BPS Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-
15	1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
16	1700	BPS Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
17	1800	BPS Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-
18	1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
19	2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
20	3100	BPS Provinsi D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
21	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-

No.	Wilayah		Laporan				Verifikasi		Selesai Telaah
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan	Non Pengaduan	Belum Proses	Telaah	Tidak Diproses	
22	3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
23	3400	BPS D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
24	3500	BPS Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
25	3600	BPS Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-
26	5100	BPS Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
27	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
28	5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	-	-	1	-	-
29	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	-	1	-	-
30	6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
31	6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
32	6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
33	6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
34	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
35	7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	1	1	-	-	1	-	-
36	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	-	-	-	1	-
37	7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
38	7500	BPS Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
39	7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
40	8100	BPS Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-
41	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
42	9100	BPS Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
43	9400	BPS Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-
44	9999	BPS Provinsi Cera	-	-	-	-	-	-	-
45	0260	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS	-	-	-	-	-	-	-
46	0270	Politeknik Statistika STIS	-	-	-	-	-	-	-
Total			4	4	-	-	3	1	-